

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPI DI
KABUPATEN LAHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**ANGGRENNY HIJAYANTI
07011381924205**

Keuangan Negara dan Daerah

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggrenny Hijayanti

NIM : 07011381924205

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Meyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Colaborative governance* Dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi in dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 20 Oktober 2023



Anggrenny Hijayanti
NIM. 07011381924205

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPI DI KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ANGGRENNY HIJAYANTI

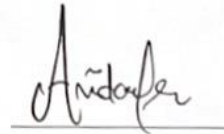
07011381924205

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 September 2023

Pembimbing

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si

NIP. 19880906201932016

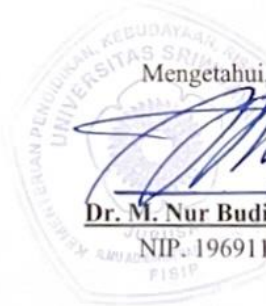


Mengetahui, Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KOPI DI KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 27 September 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016

Ketua



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

Anggota



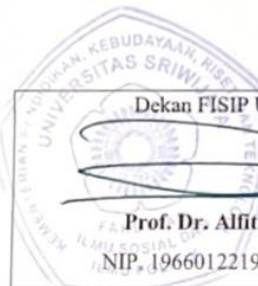


Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP

NIP. 198701052015041003

Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI</p>  <p>Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	---

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Embrace Knowledge, Radiate Kindness"

SKRIPSI INI DEDEDIKASIKAN UNTUK

ORANG TUA

FISIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KELUARGA

SAHABAT

KATA PENGANTAR

Dengan tulus dan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada Allah SWT atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Dengan anugerah-Nya, saya berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar strata satu. Keberhasilan ini hanya dapat dicapai berkat pengetahuan dan keterampilan yang telah saya peroleh.

saya berharap bahwa skripsi ini akan menjadi tambahan berharga dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang teori yang digunakan. Saya juga sangat sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini, mungkin masih terdapat kekurangan yang jauh dari harapan yang penulis impikan. Oleh karena itu, saya dengan tulus mengharapkan setiap kritik, saran, dan masukan yang dapat memberikan kontribusi positif untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi diri saya sendiri dan bagi semua yang membacanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengungkapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat atau menyinggung perasaan. Kami dengan rendah hati mengharapkan masukan yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang. Adapun judul skripsi ini adalah “ *Collaborative Governance* Dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat “

Dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang berharga oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam, terutama kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Destiawaty Kartika, S.P. selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik.
8. Seluruh seluruh narasumber yang telah memberikan informasi terkait penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua saya tersayang. Ibu Heryati dan Ayah Asmidi Jaya yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat kepada saya.
10. Kaka saya, Aditya Prayetna dan Antoni yang telah memberikan dukungan.
13. Teman saya Noni Purnama Sari. Terkhusus Adik sekaligus sahabat saya Indah Rahmahdini. Terima kasih telah menjadi support system terbaik.
14. Sahabat perkuliahan Nadya Zahrani, Ananda Azalia Ardesti dan Parinda Tia Andini, yang selalu membantu dalam manis-pahitnya bangku kuliah.

15. Risma Dwi Handayani, Rika Askara, terima kasih atas supportnya. Juga teman-teman kelas Administrasi Publik (A) Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan pengalaman baru baik dalam proses belajar maupun diluar proses belajar.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi Ini.

Akhir kata, semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Dan saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang memerlukannya.

Palembang, 18 September 2023



Anggrenny Hijayanti

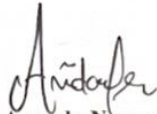
NIM : 07011381924205

ABSTRACT

This research is titled "Collaborative Governance in Enhancing Coffee Productivity in Lahat Regency." Collaborative Governance is an effort to align visions and missions to achieve common objectives. This endeavor is undertaken to realize Lahat Regency's mission to improve the livelihoods of its citizens and achieve sovereignty over available natural resources. This study aims to analyze the practice of collaborative Governance in improving coffee farming productivity in the Lahat Regency and to identify the supporting and hindering factors in the collaboration process. This research employs a descriptive approach with qualitative research methods, incorporating primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Ansell and Gash (2007) proposed the collaborative governance model referred to. The research findings indicate that collaborative Governance in efforts to enhance coffee farming productivity in Lahat Regency is relatively successful. Based on these findings, several recommendations have been proposed, such as the need for regulations outlining the role of the steering committee, expediting the development of foundational documents to enhance the competence of members through more benchmarking activities with other cities, and considering the involvement of other sub-sectors if activities related to coffee are present. This study provides valuable insights into how collaborative Governance can be effectively applied in the context of achieving the vision for regional economic development and increasing coffee productivity.

Keywords : Collaborative Governance, Coffee Productivity, Stakeholder, Collaboration

Advisor,



Annada Nasryaya, S.IP., M.Si

NIP. 19880906201932016

Palembang, September 2023

Knowing, Charjman of The Department



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

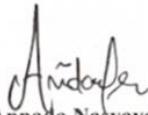
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat”. *Collaborative Governance* merupakan upaya untuk menyatukan visi dan misi guna mencapai tujuan bersama. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan misi Kabupaten Lahat untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta mencapai kedaulatan sumber daya alam yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek *collaborative governance* dalam meningkatkan produktivitas pertanian kopi di Kabupaten Lahat dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, menggabungkan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model *collaborative governance* yang diacu adalah yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan produktivitas kopi di Kabupaten Lahat berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan temuan ini, ada beberapa saran, seperti perlunya regulasi yang mengatur peran tim penggerak, percepatan penyusunan dasar yang akan meningkatkan kompetensi anggota melalui lebih banyak kegiatan studi banding dengan kota lain, dan pertimbangan untuk melibatkan sub-sektor lain jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan kopi. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana *collaborative governance* dapat berhasil diterapkan dalam konteks mencapai visi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas kopi.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Produktifitas Kopi, *Stakeholder*, kolaborasi

Pembimbing



Annada Nasryaya, S.IP., M.Si

NIP. 19880906201932016

Palembang, September 2023

Mengetahui, Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Governance.....	14

2.3 Collaborative Governance	14
2.3.1 Defenisi Collaborative Governance	17
2.3.2 Tujuan melaksanakan Collaborative Governance	24
2.3.3 Dimensi-Dimensi dalam Collaborative Governance	28
2.3.4 Model Collaborative Governance	30
2.4 Produktifitas	38
2.5 Penelitian Terdahulu.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Definisi Konsep.....	53
3.3 Fokus Penelitian	55
3.4 Jenis dan Sumber Data	55
3.4.1 Jenis Data	55
3.4.2 Sumber Data	56
3.5 Informan Penelitian	57
3.6 Teknik Pengumpulan Data	57
3.6.1 Observasi	58
3.6.2 Wawancara	58
3.6.3 Dokumentasi.....	58
3.7 Teknik Analisis Data	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	60

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
4.1.1 Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat	61
4.1.2 Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat.....	62
4.1.3 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lahat	62
4.1.4 SCopi	63
4.1.5 Koran Harian Lahat Pos	63
4.2 Hasil dan Pembahasan	63
4.2.1 Kondisi Awal.....	64
4.2.2 Desain Kelembagaan	69
4.2.3 Kepemimpinan	70
4.2.4 proses kolaborasi	70
1. <i>Face to Face</i>	71
2. Membangun kepercayaan	72
3. Proses dalam mencapai komitmen.....	73
4. Pemahaman atas keputusan Bersama	75
5. Hasil sementara.....	77
4.2.5 Faktor Yang Mempercepat Dan Memperlambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat.....	79
4.3 Pembahasan	81
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88

5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
A. Judul Penelitian	98
B. Rincian Dokumentasi	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Kabupaten Lahat.....	14
Tabel 1. 3 Data Produktifitas Kopi Kabupaten Lahat 2016-2021.....	19
Tabel 1. 4 Pihak-pihak terkait dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lahat.....	61
Gambar 4.2 Festival Kopi Lahat 2023.....	73
Gambar 4.3 Beberapa Izin Kopi Tanah Puyang.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menganut asas desentralisasi pada menyelenggarakan pemerintahan yaitu dengan menyampaikan kesempatan serta keleluasaan pada wilayah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Asas desentralisasi dilakukan menggunakan cara tugas dan wewenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan rakyat setempat diserahkan kepada pemda.(Is et al., 2021). Dengan demikian, rencana prioritas pemerintahan Indonesia yang dikenal menggunakan Nawacita di poin ketiga, yaitu "menciptakan Indonesia asal pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah serta desa pada kerangka negara kesatuan" memerlukan perhatian spesifik. Tujuannya ialah buat menaikkan kesejahteraan dan kualitas hayati warga desa. Namun, konsep pembangunan yang terfokus pada kota-kota besar, khususnya di Ibu Kota Negara Indonesia, telah menyebabkan daerah lain dan desa-desa pinggiran kota tertinggal dalam pembangunan. Hal ini juga mengurangi peran pemerintah desa dalam mengimplementasikan pembangunan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (W. Astuti, 2017)

Pembangunan merupakan proses transformasi dari sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri menjadi lebih bermanfaat bagi produksi barang dan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan terhadap tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi (Purba et al., 2021).

Pembangunan bisa disimpulkan menjadi perubahan-perubahan yang direncanakan dengan mengelola potensi alam, insan, sosial dan budaya yang ada di suatu negara.

Mengelola potensi alam yaitu mengetahui potensi alam yang terdapat di suatu daerah kemudian membuat dan memanfaatkan yang akan terjadi alam menggunakan sebaik-baiknya. Sedangkan potensi manusia dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan serta keterampilannya sebagai akibatnya dapat mengelola potensi alam menggunakan bijaksana (Soewartoyo & Soetopo, 2009).

Pemerintah daerah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mengelola sumber daya guna membangun kerangka kemitraan dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Peran penting pembangunan ekonomi daerah dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional tidak boleh diabaikan (Ananda, 2018).

Dimana sektor perkebunan telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, bahwa pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Diantaranya perencanaan, pelaksanaan usaha perkebunan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan dan pemberian rekomendasi penanaman modal.

Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom, pemerintahannya dituntut untuk mengidentifikasi potensi sumber daya dan kondisi yang ada di daerahnya dengan cermat, sehingga dapat memanfaatkan kekayaan alam di sektor perkebunan yang dimilikinya untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional (Karianga, 2017). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 bahwa hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

Kabupaten Lahat, sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, memiliki potensi alam yang berupa perkebunan kopi. Seperti Tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2017, bahwa kopi merupakan industri unggulan provinsi. Luasan lahan kopi di Provinsi Sumatera Selatan lebih luas dibandingkan dengan Provinsi Lampung, yaitu seluas 249.000 hektare atau 21% dari luas kopi nasional. Selain itu, produksi kopi di Provinsi Sumatera Selatan juga lebih tinggi, yaitu sebesar 26,73% dari produksi kopi nasional. Kecamatan Kota Agung dan kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, merupakan lokasi utama produksi kopi di Provinsi Sumatera Selatan dengan luasan area perkebunan kopi seluas 21,74% dari total luasan provinsi, dengan produktivitas kopi sebanyak 2,2 ton per hektar. Mayoritas kopi yang diproduksi di Provinsi Sumatera Selatan adalah jenis Kopi Robusta yang tumbuh dengan baik pada ketinggian 400-700 meter DPL. (Admin Disbun, 2022)

Tabel 1. 1 Data Pendapatan Kabupaten Lahat

Tahun	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi
2017	26 732,60	325,00	187 685,00	21 601,00
2018	26 732,60	325,00	188 525,00	21 601,00
2019	26 195,00	315,00	165 105,00	18 625,00
2020	26 537,60	325,00	165 105,00	21 620,00
2021	20 150,00	325,00	19 100,00	17 100,00

Pada data, kopi menjadi salah satu PAD Lahat sektor utama dibidang pertanian dan peternakan. Kopi memberikan penghasilan yang cukup tinggi pada PAD Lahat, untuk

itu perlu terus dikembangkan agar mendapatkan hasil yang optimal. Masih banyak yang tidak paham dengan pengetahuan mengenai penjualan, pedagang serta masih banyaknya petani yang kurang mengetahui tata cara berkebun kopi sehingga dapat menghasilkan kopi yang optimal. Tidak hanya itu saja, petani juga belum mengetahui persoalan pendapatan menurun dikarenakan pohon kopi yang sudah tua. Keterkaitan usaha untuk meningkatkan produktivitas kopi di Lahat membutuhkan penanganan khusus oleh dinas perkebunan kabupaten Lahat. usaha yang dilakukan oleh dinas ini dengan melakukan kolaborasi berbagai pihak terkait seperti beberapa koperasi, UMKM, serta petani kopi. guna mencapai keberhasilan untuk meningkatkan produktivitas kopi di Kabupaten Lahat. Adanya kerjasama yang dibangun antara Dinas Pertanian Lahat yang pada saat ini sudah menjadi Dinas Perkebunan Lahat semenjak tahun 2020 dengan SCOPI (*Sustainable Coffee Platform Indonesia*) mengenai pendampingan petani kopi melalui penerapan kurikulum nasional dan manual pelatihan budidaya berkelanjutan dan teknik pascapanen.

Tabel 1. 2 Data UMKM Kopi Di Kabupaten Lahat

No.	IKM	Nama Pemilik
1.	Kopi Bubuk Bukit Jempol	Hasnul Basri
2.	Kopi Baba Lee	Welli Wilyanto
3.	Kopi Tanah Puyang	Yhoga Rama Sutra
4.	Kopi Legenda	Pratama Adi Winata
5.	Jarai Coffe Roastery	Imama Wibisno

6.	Dangau Coffe	Nanada A. Lubis
7.	Kopi Bubuk Sri Buana	Tri Saputra
8.	Kopi Bukit Serelo	Cv. Bola Dunia
9.	Basemah Coffee Shop	Rio Adidhama
10.	Kopi Ribang Gale	Fitriani

Pola kerjasama yang berlangsung antara Dinas Perkebunan kabupaten Lahat dengan *stakeholder* non – pemerintah bersifat kolaborasi. Secara harfiah menurut Ansell dan Gash Pemerintahan yang mengatur lembaga-lembaga publik dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses formal untuk mengambil keputusan secara bersama-sama dengan menggunakan konsensus dan musyawarah untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Dalam hal ini dinas perkebunan kabupaten Lahat memberikan peran kepada *stakeholder* non – pemerintah melakukan fungsi kerja sesuai kapasitas yang dimiliki ataupun sesuai dengan bidang masing-masing agar dapat mengoptimalkan hasil produksi kopi di kabupaten Lahat.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diharap dapat memberikan solusi untuk meningkatkan hasil produksi kopi di Kabupaten Lahat. Berdasarkan UUD 1994, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahannya dengan otonomi dan tugas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan untuk memfasilitasi masyarakat. Dengan otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan di Kabupaten Lahat dapat tercapai bila masyarakatnya dapat menyadari potensi pertanian sebagai aset yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Untuk mencapainya, salah satu strategi yang penting adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat pertanian. Pemberdayaan kepada masyarakat memiliki nilai penting yang tidak dapat diabaikan. Kekuatan yang dimaksud dapat diukur dari berbagai aspek, seperti aspek fisik, material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, intelektual, dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan kemandirian, agar masyarakat dapat melakukan, memahami dan menerapkan berbagai kegiatan pembangunan.

Salah satu komoditas unggulan yang menonjol di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sektor perkebunan kopi. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas lahan perkebunan kopi terluas di Indonesia, mencapai 249.000 hektar atau sekitar 21% dari total luas perkebunan kopi nasional. Luas perkebunan kopi di Sumatera Selatan melebihi luas perkebunan kopi di Lampung yang hanya mencapai 156.000 hektar. Selain itu, produksi kopi di Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 26,73% terhadap produksi kopi nasional secara keseluruhan. Kecamatan Kota Agung dan kecamatan Tanjung Sakti di Kabupaten Lahat merupakan daerah dengan produksi kopi terbesar di Sumatera Selatan. Kedua kecamatan tersebut mencakup sekitar 21,74% dari total luas perkebunan kopi di provinsi ini, dengan tingkat produktivitas kopi mencapai 2,2 ton per hektar. Mayoritas jenis kopi yang diproduksi di wilayah ini adalah Kopi

Robusta, yang tumbuh optimal pada ketinggian antara 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut.

Daerah perkebunan kopi di kabupaten Lahat terdapat pada kecamatan kota agung dan kecamatan Tanjung Sakti. Kecamatan Masyarakat desa di Kelurahan Kota Agung, yang terletak di daratan tinggi, terutama bergantung pada tanaman kopi sebagai mata pencaharian utamanya. Sebagian besar penduduk setempat menjadikan tanaman kopi sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, tanaman ini hanya dapat dipanen dua hingga tiga kali setahun, yang berarti bahwa pendapatan mereka terbatas.

Pada kondisi di kecamatan Tanjung Sakti, secara umum sama halnya dengan kecamatan Kota Agung. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Pada kecamatan Tanjung Sakti hasil tani didominasi dengan hasil buah-buahan. Pada data untuk tanaman sayur-sayuran, hasil tani terbesar berupa cabai dengan 7,3 ton. Untuk tanaman buah-buahan, hasil tani terbesar berupa durian dengan 115,2 ton. Serta, untuk tanaman perkebunan, hasil tani terbesar berupa kopi dengan 2,940 ton. Dari data ini, disimpulkan hasil tanaman perkebunan masih diunggulkan kopi di kecamatan tanjung sakti diikuti dengan kelapa.

Pemerintah Kabupaten Lahat melihat bahwa pentingnya melakukan tindakan untuk meningkatkan kembali hasil produktivitas kopi di Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Sakti di Kabupaten Lahat, Pemerintah Sumatera Selatan menganggap Sektor Perkebunan sebagai andalan, dengan tanaman kopi sebagai tanaman potensial yang paling banyak ditanam oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah setempat telah membuat kebijakan yang menempatkan tanaman kopi sebagai tanaman prioritas. Selain meningkatkan areal tanam, produksi juga dapat

ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas. Masyarakat swadaya, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta telah bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan. Program-program yang telah dirancang untuk pengembangan ekonomi agribisnis kopi menunjukkan komitmen semua pihak dalam melakukan langkah nyata. Bahkan, petani yang tidak bisa mengikuti pelatihan akan mencari informasi dari petani yang sudah mengikutinya. Diharapkan bahwa dengan adanya berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, hasil produksi kopi di Kabupaten Lahat dapat meningkat, yang kemudian akan membawa dampak positif bagi pendapatan masyarakat.

Namun, petani kopi di Kabupaten Lahat telah menghadapi banyak masalah selama beberapa tahun terakhir. Masalah dalam peningkatan hasil produktivitas kopi di Kabupaten Lahat meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan akurat menjadi tantangan dalam pengembangan tanaman kopi. Perubahan iklim, seperti pola hujan yang tidak menentu atau periode kekeringan yang berkepanjangan, dapat mengganggu pertumbuhan dan produksi kopi. Kedua, tanaman kopi yang sudah mencapai usia tua menjadi rentan terhadap penurunan produktivitas. Tanaman yang tidak diperbaharui secara rutin atau tidak diberikan perawatan yang optimal akan mengalami penurunan kualitas dan rendahnya hasil panen. Ketiga, serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi menjadi ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam produksi. Serangga penggerek buah kopi, penyakit karat daun, atau serangan ulat daun merupakan beberapa contoh masalah hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman kopi. Selain itu, faktor lain seperti manajemen pertanian yang kurang efektif,

kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, dan rendahnya kesadaran petani tentang praktik pertanian yang baik juga berperan dalam membatasi peningkatan hasil produktivitas kopi di Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan hasil produktivitas kopi di Kabupaten Lahat.

Tabel 1. 3 Data Produktifitas Kopi Kabupaten Lahat 2016-2022

Tahun	Produksi Kopi (Ton)
2016	20,551
2017	21,601
2018	21,601
2019	18,625
2020	21,620
2021	17,100
2022	22, 100

Sumber : BPS 2022

Tabel 1. 4 Pihak-pihak terkait dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat

No.	Pihak-pihak terkait	Bidang yang ditangani	Kontribusi	Keterangan

1.	Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat	-	Pembinaan Petani Kopi dan memberi bantuan	Koordinator
2.	Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat	-	Perindustrian mengenai kopi	Tenaga Teknis
3.	Dinas Pangan	-	Pembinaan pascapanen Kopi	Tenaga Teknis
4.	SKOPI <i>(Sustainable Coffee Platform Indonesia)</i>	-	Pembekalan petani kopi	Faktor Pendukung
5.	UMKM Kopi	Kopi	Meningkatkan nilai jual kopi	Faktor Pendukung
6.	LahatPos	Media Informasi	Menyebarkan informasi	Faktor Pendukung

Dari data produktifitas kopi kabupaten Lahat dalam 5 tahun dari 2016 sampai 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis. Meskipun tahun 2018 dengan 2019 tidak mengalami perubahan. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Namun pada tahun

2021 mengalami penurunan yang lumayan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang selisihnya 1.525 Ton. Adanya keterlibatan antar beberapa aktor baik dari instansi pemerintah dan juga swasta yang turut ikut mengupayakan untuk meningkatkan produktivitas Kopi di Kabupaten Lahat. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat DK Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan.

“tentu kami berusaha untuk dapat meningkatkan produksi kopi dari tahun ke tahun. Dimana kami berusaha untuk memberi penyuluhan dalam upaya mengoptimalkan hasil tani, kan kalau di desa-desa itu ilmu untuk mengoptimalkan hasil tani itu masih minim, kami berusaha untuk dapat erus mengedukasi sebaik dan semaksimal mungkin. Kami juga jika dapat bantuan dari pusat kami fokuskan untuk merata dapat dirasakan semua petani. Namun itu tadi masih banyak kendala-kendala karena cakupannya kan besar ya, kita masih perlu peran-peran lain untuk dapat mengoptimalkannya dengan melakukan Kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.”

Hal ini didasari oleh kurangnya peran dari pemerintah dalam memberikan arahan kepada petani. Namun, bukan berarti petani selaku masyarakat dan UMKM kopi selaku swasta tidak bermasalah. Dari ke-tiga aspek tersebut, memiliki masalah masing-masing yang jika melakukan proses *Colaborative governance*. Dapat ditinjau masalah dengan meninjau dari teori Ansell proses *Colaborative governance* dalam menangani masalah produksi kopi pada kabupaten Lahat terdapat dimensi yang memiliki masalah.

Setelah berbagai macam pernyataan. Hal ini menjadi daya tarik, sehingga penelitian ini sangat penting dilakukan. Maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “*Colaborative governance* Dalam Peningkatan Produktivitas Kopi Di Kabupaten Lahat.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana *Collaborative Governance* pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kopi di Kabupaten Lahat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam meningkatkan hasil produktivitas kopi di Kabupaten Lahat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya *Collaborative Governance* dalam pemerintahan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi dinas perkebunan dan *stakeholder* terkait penerapan *Collaborative Governance* dalam peningkatan produktivitas kopi di kabupaten Lahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, S. (1994). *Skematika. Teori Dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.*
- Admin Disbun. (2022, July 7). *Kopi Arabika Kawasan Semendo.* Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan.* Universitas Brawijaya Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (n.d.). *Collaborative governance : dalam perspektif administrasi publik.*
- Astuti, W. (2017). REGULATORY IMPACT ANALYSIS PROGRAM NAWACITA PRESIDEN: MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN MELALUI KEBIJAKAN DANA DESA. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*, 34.
- Azis, A., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Collaborative governance dalam upaya meningkatkan kinerja sektor pertanian. *Jurnal Manajemen*, 13(4), 647–653.

- Breyer, S., Zeckhauser, R. J., & Donahue, J. D. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*.
- Chang, H. (2009). Collaborative Governance in Welfare Service Delivery: Focusing on Local Welfare System in Korea. *International Review of Public Administration*, 13, 75–90. <https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805141>
- Charalabidis, Y., & Koussouris, S. (2012). *Empowering open and collaborative governance: Technologies and methods for online citizen engagement in public policy making*. Springer Science & Business Media.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM press.
- Fachruddin, M., Nur, M., & Basri, H. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Fakkak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6437–6445.
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9.
- Harakan, A., & Ferawaty, F. (2020). Collaborative Governance Dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 3(1), 38–53.
- Harley, J., & Blismas, N. (2010). An anatomy of collaboration within the online environment. *E-Research Collaboration: Theory, Techniques and Challenges*, 15–34.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47–53.

- Hastaningsih, H., Adianto, A., & Asari, H. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Dumai. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(2), 619–627.
- Holzer, M. (2012). An analysis of collaborative governance models the context pf shared services. *Charlotte: Information Age Publishing*, 349–386.
- Is, M. S., SHI, M. H., Budianto, K., & SH, M. S. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Prenada Media.
- Junaidi. (2015). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KRISIS LISTRIK DI KOTA TANJUNGPINANG*.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. *Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- O’Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* ANU Press.
- Perdana, V. A., Syafiqurrohman, A., Saputro, M. N. C. E., Hanif, N. A., Ahsan, M. M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 252–269.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., & Rozaini, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.

- Santy, Y. J. N., & Alam, M. D. S. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Tengah Pandemi COVID-19. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(2), 95–107.
- Sedarmayanti, G. G. (2003). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Bandung: Mandar Maj*.
- Soewartoyo, & Soetopo, T. (2009). *Potensi Sumber Daya Alam Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kawasan Masyarakat Pesisir, Kabupaten Bangka. Vol. IV, No. 2*.
- Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 55–65.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Wanna, J. (2008). Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes. *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia*, 3–12.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23.